

Ratu-Ratu Aceh Abad Ke-17 M

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kekuasaan

Rd. Siti Sa'adah*

Abstract: The women government (power) in Aceh Darussalam Sultanate had happened for almost 60 years by four women sultanah from 1641-1699 AD. They are Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688), and Sultanah Kamalatuddin Syah (1688-1699). There are many factors caused the sultanah raising to the power in Aceh, some of them are the particular situation and condition, such as no prince crown born.

Kata Kunci: Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, dan Sultanah Kamalatuddin Syah

P. J. Veth, profesor etnologi dan geografi dari Universitas Leiden, Belanda,¹ pada 1870 menulis tentang *Pemerintahan Wanita di Kepulauan Nusantara*. Dalam tulisannya ia mengakui bahwa tidak mudah menemukan figur wanita yang memerintah di Nusantara. Namun, ia dapat juga menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan pengaruh yang menentukan dari pemerintahan kaum wanita atas sebuah kerajaan, Salah satu kasus terpenting yang menarik perhatiannya adalah yang ada di Aceh, menurutnya "... yang paling mengagumkan dari semua contoh pemerintahan wanita di kepulauan Nusantara adalah yang terdapat di kerajaan Aceh, Sumatera, suatu kerajaan yang mempunyai tempat yang sangat penting dalam sejarah." Kekuasaan wanita di

*Penulis adalah dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang, sedang menyelesaikan studi S3 pada Sekolah Pascasarjana (SPs) universitas tersebut.

kerajaan Aceh Darussalam (selanjutnya ditulis Aceh) pernah berlangsung selama hampir 60 tahun yang dijabat oleh 4 orang ratu atau sultanah secara berturut-turut dari 1641-1699 M. Mereka adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688), dan Sultanah Kamalatuddin Syah (1688-1699).

Tampilnya pemimpin perempuan di Aceh terlihat sejak Sultan Alaidin Riayat Syah al-Mukammal (1589-1604) mengangkat Keumalahayati sebagai laksamana (admiral) armada laut Aceh. Kemudian dibentuk Resimen Wanita Pengawal Istana, dan pada masa Sultan Iskandar Muda dibentuk Divisi Keumala Cahaya, yang anggota-anggotanya hanya terdiri atas wanita. Peranan wanita di Aceh telah berlangsung lama, maka pengangkatan empat sultanah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, dikarenakan sultanah merupakan pucuk pimpinan negara, maka tidak heran bila menjelang penobatan Safiatuddin muncul kontroversi tentang hukum wanita sebagai kepala negara menurut Islam. Ternyata para pendukung sultanah lebih kuat sehingga penobatan Safiatuddin pun dapat dilaksanakan, begitu pula dengan penoba-

tan sultanah kedua dan ketiga. Menjelang penobatan sultanah keempat pertentangan semakin keras, tetapi karena pihak yang anti ini belum kuat, maka kemenangan masih diraih pihak yang pro. Keadaan menjadi berbalik setelah Kamalatuddin berkuasa hampir 10 tahun. Pihak oposisi bertambah kuat dengan membelotnya beberapa pembantu dekat ratu, termasuk di antaranya *qādi* Malikul Adil yang menggantikan Abdurrauf al-Sinkili. Akhirnya, dengan bekal secarik kertas dari Mekkah yang berisi fatwa tentang larangan mengangkat wanita sebagai kepala negara, pihak oposisi pun dapat tersenyum lega menikmati kemenangan. Tulisan ini akan mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengangkatan sultanah. Faktor pendukung terdiri atas faktor politis, sosiologis, dan teologis; sedangkan faktor penghambat meliputi keberadaan pihak oposisi, pembelotan beberapa pembesar kerajaan, intrik-intrik istana, dan adanya fatwa dari Mekkah.

Faktor Politis

Setelah Sultan Iskandar Muda wafat secara tiba-tiba pada 27 Desember 1636,² tongkat kepemimpinan Aceh dikendalikan menantunya, Sultan Iskandar Tsani, suami Safiatuddin. Hal ini dikarena-

kan Sultan Iskandar Muda tidak mempunyai putra mahkota.³ Iskandar Tsani adalah putra Pahang yang dibawa ke Aceh bersama orang tuanya sebagai tawanan, setelah Aceh menaklukkan negeri itu pada 1618. Sultan sangat tertarik dengan sifat dan budi pekertinya, itulah di antaranya yang mendorong Sultan untuk mengambil Tsani menjadi menantu.⁴

Iskandar Tsani dinobatkan menjadi raja pada usia 25 tahun dengan gelar Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah. Pengangkatannya sebagai raja mendapat tentangan dari pihak-pihak yang menginginkan raja adalah putra Aceh asli. Namun, berkat bantuan isterinya, Safiatuddin, gejolak itu dapat diredam. Gaya kepemimpinan Iskandar Tsani yang lunak jauh berbeda dengan Iskandar Muda yang keras. Hal itu terlihat pada perhatian yang lebih besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan agama pada masa Iskandar Tsani, dan bidang militer pada masa Iskandar Muda.

Setelah berkuasa selama 5 tahun, Iskandar Tsani meninggal dunia pada 15 Februari 1641. Kepergiannya tidak meninggalkan putra mahkota karena tidak dikaruniai anak. Dengan demikian, pengalaman yang terjadi pada masa Iskandar Muda terulang kem-

bali. Anggota keluarga dari pihak Iskandar Tsani maupun Iskandar Muda yang berpulang besar untuk menggantikan posisinya adalah Safiatuddin.⁵ Kenyataan itu membuat rakyat Aceh menjadi cemas dan gelisah, sedangkan di kalangan pembesar kerajaan muncul sedikit pertentangan mengenai boleh-tidaknya wanita menjadi raja, karena menurut mereka bertentangan dengan hukum Islam.

Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat itu, muncul beberapa pendapat. *Pertama*, bahwa setelah Iskandar Tsani wafat, permaisurinya diangkat menggantikan kedudukannya. *Kedua*, menurut de Graaf,⁶ yang saat itu berada di Aceh setelah kejatuhan Malaka, kematian Iskandar Tsani telah menimbulkan huru hara besar. Setiap pembesar ingin menjadi raja dan banyak orang yang meninggal dunia disebabkan kegaduhan yang terjadi.

Oleh karena itu, para pembesar kerajaan dan ulama di bawah pimpinan *qādī* Malikul Adil Nuruddin al-Raniri, mengadakan musyawarah untuk membicarakan siapa yang berhak dinobatkan menjadi sultan Aceh. Setelah pertukaran pikiran yang cukup alot ditetapkanlah bahwa permaisuri Iskandar Tsani, Safiatuddin, yang sekaligus putri Iskandar Muda patut diangkat

menjadi sultanah Aceh. Atas dasar putusan tersebut, Safiatuddin dinobatkan menjadi sultanah pertama dengan gelar *Paduka Sri Sultānah Tajul Alam Safiatuddin Syah berdaulat Zil Allāh fil Alam ibnat Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat*. Djajadiningrat mengatakan bahwa 3 hari setelah Iskandar Tsani wafat, orang-orang sepakat untuk mengangkat Poetri Sri Alam Permaisuri, anak Iskandar Muda menjadi ratu memakai gelar *Tajul Alam Safiatuddin Syah*. Tanggung jawab tersebut, tentunya, menjadi beban yang sangat berat yang harus dipikul Safiatuddin, apalagi dalam situasi seperti itu. Tentang hal ini, M. Yunus Jamil menggambarkan :⁷ ...sungguh amat berat beban yang dipikul Sri Ratu, di samping menghadapi dan mengatasi politik VOC Belanda yang telah berhasil merebut kota Malaka dari tangan Portugis pada 14 Januari 1641 M, juga menghadapi persoalan dalam negeri yang ruwet. Penganut-penganut paham Wujudiyah menentang kedaulatan baginda. Mereka mengatakan tidak sah.

Krisis putra mahkota bukan hanya terjadi di Aceh pada abad ke-17, tetapi juga di beberapa kerajaan di Nusantara beberapa abad sebelumnya. Seperti di Kalinyamat pada awal abad ke-16, wilayah yang terletak dekat Jepara ini

adalah vazal kesultanan Demak. Ratu Kalinyamat menggantikan suaminya sebagai raja karena tidak mempunyai anak.⁸ Dia adalah putri Sultan Trenggana dari Demak yang menikah dengan penguasa Kalinyamat. Ki Kalinyamat meninggal dibunuh oleh Aria Penangsang dari Jipang, salah satu vazal Demak, karena persaingan memperebutkan tahta Demak.

Begitu pula di kerajaan Majapahit, Jawa Timur, pada abad ke-14, ketika raja Jayanegara meninggal dunia pada 1326 dan tidak mempunyai putra mahkota, maka adik putrinya diangkat sebagai ratu dengan gelar Tribuanatungga-dewi Jayawisnuwardhani.

Faktor Sosiologis

Masuknya agama Islam ke Aceh dan menjadi dasar negaranya mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang harus ditaati. Pengaruh Islam itu ternyata kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong tampilnya wanita-wanita Aceh dalam berbagai aktifitas di tengah masyarakat, terutama bidang politik.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pengangkatan Keumalahayati sebagai laksamana (admiral)

armada laut merupakan titik awal terbukanya peluang bagi wanita untuk menduduki posisi penting di Aceh. Sebelumnya, Keumalahayati pernah menjabat sebagai pemimpin pasukan wanita Aceh. Karena keberhasilannya dalam memimpin dan mendapat kepercayaan dari Sultan Alaidin Riayat Syah al-Mukammil (1589-1604) yang pada waktu itu kurang memercayai laki-laki sebagai pemegang jabatan, maka ia diangkat sebagai admiral.⁹

Saat itu usia sultan sekitar 94 tahun. Di istana muncul intrik berkaitan dengan suksesi dan usaha untuk menyingkirkannya dari singgasananya. Karena kecurigaan terhadap kaum laki-laki, sultan akhirnya sampai pada keputusan untuk mengangkat wanita sebagai admiralnya. Selain itu diangkat pula wanita lainnya sebagai pemimpin "dewan rahasia" istana yang oleh Van Zeggelen, disebut sebagai *geheimraad*. Wanita itu adalah Cut Limpah.¹⁰

Pasukan wanita Aceh terdiri atas para janda yang suaminya gugur dalam perang antara Aceh dengan Portugis. Pembentukannya merupakan ide Keumalahayati. Tujuannya agar para janda itu dapat menuntut balas atas kematian suami mereka. Pasukan ini disebut Armada Inong Bale yang berpangkalan di benteng

Kuta Inong Bale.¹¹ Keumalahayati berasal dari keturunan sultan-sultan Aceh terdahulu. Ayahnya, Muhammad Syah, seorang laksamana. Kakeknya, dari garis ayah juga laksamana bernama Muhammad said Syah, putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintah tahun 936-945 H/1530-1539. Sultan Salahuddin Syah adalah putra Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530), pendiri Aceh Darussalam. Keumalahayati merupakan kepercayaan Sultan, karena dianggap mampu. Pengangkatannya sebagai laksamana mungkin disebabkan adanya semangat kebaharian (kelautan) yang ada dalam dirinya.

Selain itu terdapat juga Sukey Inong Kaway Istana atau Resimen Wanita Pengawal Istana, yang dibentuk oleh Sultan Muda Ali Riayat Syah V. Anggotanya terdiri atas para wanita yang masih dara maupun yang sudah bersuami. Resimen ini dipercayakan untuk menjaga dan memelihara tata tertib dalam istana Daruddunia, termasuk protokol, bahkan menjadi barisan kehormatan bila datang tamu kehormatan. Komandannya adalah laksamana Meurah Ganti. Pada masa Iskandar Muda, dibentuk pula Divisi Keumala Cahaya, yang semuanya terdiri atas wanita, dimaksudkan untuk memper-

besar pasukan pengawal istana.¹² Data di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa keterlibatan wanita dalam berbagai aktifitas di kerajaan Aceh Darussalam telah berlangsung sebelum kehadiran para ratu.

Faktor Teologis

Faktor teologis/agama menjadi bagian yang tak pisahkan dari kedua faktor di atas. Sebagai kerajaan Islam, Al-Quran dan Hadis menjadi sumber rujukan hukum pertama dan utama di kerajaan tersebut. Begitu pula ketika Safiatuddin akan diangkat sebagai ratu. Perdebatan muncul di tengah masyarakat tentang hukum kepala negara wanita dalam Islam. Sebagian ulama me-nyatakan kebolehan, sebagian lainnya mengatakan tidak. Ulama yang membolehkan dipimpin oleh Nuruddin al-Raniri, yang pada saat itu menjabat sebagai *qāḍī*. Sedangkan kelompok yang tidak setuju adalah para pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani yang menganut paham Wujudiyah. Selain Nuruddin al-Raniri, ulama yang mendukung kepemimpinan wanita adalah Abdurrauf al-Sinkili. Menjelang penobatan Safiatuddin, ia belum menjadi pejabat istana sehingga tidak terlibat dalam perdebatan itu. Menurut Azra, dalam periode sebelum al-

Sinkili berangkat ke Arab sekitar 1052/1642, Aceh ditandai kontroversi dan pertikaian antara para penganut doktrin Wujudiyah dan pengikut al-Raniri. Tidak ada indikasi sama sekali bahwa al-Sinkili bertemu dan mempunyai hubungan pribadi dengan al-Raniri, yang berada di Aceh pada masa antara 1047/1637 hingga 1054/1645. Tetapi dia pasti tahu tentang ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin serta fatwa dan penganiayaan yang dijatuhkan al-Raniri atas para pengikut mereka. Al-Sinkili, tampaknya, berusaha melepaskan dirinya dari kontroversi itu. Meski semangat tulisan-tulisan al-Sinkili menunjukkan bahwa dia berbeda dari Hamzah maupun Syamsuddin, tetapi tidak ditemukan bukti dalam ajaran-ajarannya yang secara gamblang menentang ajaran-ajaran mereka. Ia juga mempunyai sikap yang sama terhadap al-Raniri. Secara tidak langsung ia mengkritik cara al-Raniri menjalankan pembaruan; ia tidak berselisih paham dengan ajaran-ajarannya secara umum.¹³

Setelah hampir 19 tahun belajar pada sejumlah ulama di Arab, al-Sinkili kembali ke Aceh ketika masih di bawah kendali Safiatuddin. Kehadirannya, menciptakan rasa penasaran di kalangan istana. Tidak lama kemudian, al-Sin-

kili dikunjungi pejabat istana, Katib Seri Raja ibn Hamzah al-Asyi yang mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas tentang masalah keagamaan. Menurut Voorhoeve, jabatan al-Asyi adalah Keureukon Katiboy Mulo, yaitu Sekretaris Rahasia Sultanah. Karena itu Voorhoeve percaya, al-Asyi diutus Sultanah untuk menyelidiki pandangan keagamaan al-Sinkili. Al-Sinkili berhasil lulus dari ujian itu, karena tidak lama kemudian ia masuk dalam jajaran pejabat istana menggantikan al-Raniri sebagai *qā-dī* atau mufti yang bertanggung jawab atas masalah keagamaan. Setelah al-Raniri, jabatan itu sempat dipegang oleh Sayf al-Rijal, pendukung kuat aliran Wujudiyah.¹⁴ Berarti, al-Sinkili tahu persis proses pengangkatan ratu-ratu sesudah Safiatuddin. Ia menjadi ulama utama pendukung pengangkatan wanita sebagai ratu.

Terhadap penganut Wujudiyah yang tidak mendukung kepemimpinan wanita, al-Sinkili telah menunjukkan toleransinya yang sangat tinggi. Ia kelihatannya tidak begitu mempersoalkan masalah tersebut. Dengan sikapnya yang arif dan penuh *tasamuh* itu pertentangan kelompok Wujudiyah terhadap para ratu dapat dikendalikan, sehingga penobatan empat orang wani-

ta sebagai ratu secara berturut-turut dapat dilaksanakan. Hingga akhir hayatnya ia telah menyertai perjalanan pemerintahan empat ratu. Iapun ikut merasakan pahit-manisnya kehidupan politik di Aceh saat itu.

Al-Sinkili hampir tigapuluh tahun mengajar dan menulis di Aceh. Murid-muridnya sangat banyak dari berbagai pelosok Nusantara. Ia menjadi ulama yang dihormati karena sikapnya yang santun dan terbuka serta penuh toleransi. Ia tidak hanya dikenal di kepulauan Melayu (Indonesia), bahkan di dunia Islam lainnya, seperti Mekkah, Mesir, dan Turki berkat karya-karyanya yang tersebar luas. Ia meninggal pada 1693 dan disemayamkan di muara sungai Aceh. Ia juga dikenal dengan sebutan Syiah Kuala yang makamnya senantiasa diziarahi orang.

Faktor-Faktor Jatuhnya Ratu

1. Pihak Oposisi

Kelompok oposisi yang menentang pengangkatan wanita sebagai ratu muncul menjelang penobatan Safiatuddin hingga berakhirnya kekuasaan ratu. Mereka tidak henti-hentinya merongrong pemerintahan ratu, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Konfrontasi nyata terjadi pada masa ratu kedua, Naqiatud-

din, dengan melakukan pembakaran terhadap bangunan-bangunan penting dan puncaknya pada masa ratu terakhir dengan mendatangkan fatwa dari Mekkah.

Tidak ada gambaran jelas apakah kelompok oposisi ini penganut Wujudiyah murni atau terdiri atas para ulama atau elite politik yang haus kekuasaan berlabel Wujudiyah. Boleh jadi mereka adalah gabungan antara beberapa anggota Wujudiyah dengan elite politik itu. Keterlibatan Wujudiyah sebagai oposisi pada masa Safiatuddin terungkap dalam pernyataan di bawah ini: *Pengacauan yang dilakukan Wujudiyah pada masa pemerintahan Safiatuddin, telah menjurus ke arah satu usaha pemberontakan, sehingga terpaksa ratu mengambil tindakan keras yang tidak kenal ampun terhadap mereka atas nasihat Syekh Nuruddin al-Raniri, yaitu dilarangnya berkembang paham Wujudiyah di kerajaan Aceh Darussalam... yang sangat memarahkan ratu yaitu kampanye kaum Wujudiyah yang memfatwakan bahwa menurut hukum Islam kaum wanita tidak boleh menjadi raja; fatwa tersebut langsung ditujukan untuk menjatuhkan ratu.*¹⁵

Konfrontasi Wujudiyah semakin menyolok di masa Naqiatuddin, sebagaimana dinyatakan oleh Ilyas Sutan Pa-

menan:¹⁶ *Pada masa pemerintahan Baginda terjadi sabotase (pembakaran Masjid Baiturrahim dalam keraton Daruddunia, istana Sultan, dan Balai Mahkamah Rakyat).*

2. Elite Politik Membelot

Keterlibatan elite politik terlihat nyata menjelang penobatan ratu terakhir, Kamalatuddin. Saat itu beberapa pembesar kerajaan memimpin pasukan untuk menggagalkan penobatan ratu, namun hal ini bisa diatasi para pendukung ratu. Peristiwa ini digambarkan Djajadiningrat sebagai berikut:¹⁷ *Setelah ratu mangkat (Zakiatuddin), wanita lain dipilih untuk menggantikannya, tetapi bukan dengan persetujuan secara umum, beberapa orang ingin mengangkat seorang raja. Empat di antara para Orang Kaya oleh karenanya memimpin suatu angkatan yang cukup besar yang bertolak untuk menyerang kota dan mengatur diri mereka.*

Ini sejalan dengan Pamenan yang mengatakan bahwa pasukan yang maha kuat dipimpin 4 Ulubalang menyerbu dari pedalaman ke ibukota dan setelah melakukan pertempuran beberapa hari lamanya, mereka dapat menduduki sebagian lembah sungai Aceh dan berhadapan dengan rakyat pendukung ratu.¹⁸

Menurut de Roy yang berada di Aceh pada 1696, orang Aceh merasa tidak puas di bawah pemerintahan wanita. Gejala tersebut kelihatan ketika diadakan pemilihan ratu, kadang-kadang datang massa yang cukup besar tetap menginginkan raja. Selain Orang Kaya, *qādi* pengganti Abdurrauf al-Sinkili, menurut beberapa catatan, berbalik membelakangi ratu dan mendukung pihak oposisi.

3. Intrik-Intrik di sekitar Istana

Kehidupan pribadi ratu (raja) dan keluarga, biasanya menjadi sasaran bagi para penebar gosip di kerajaan Aceh. Pelakunya bukan hanya penghuni istana tetapi juga orang Belanda. Hal ini dialami oleh para sultan dan ratu, apalagi keempat ratu itu tidak bersuami; kecuali Safiatuddin sebagai janda Iskandar Tsani, ketiga orang ratu lainnya tidak ada kejelasan tentang hal ini.

Di masa Safiatuddin, muncul isu yang mengatakan bahwa ia akan menikah dengan orang Belanda. Isu ini muncul setelah ia memberi banyak hadiah kepada pembesar Belanda. Antara lain Gubernur Jenderal Maetsuyker (1653-1678) 80 bahar lada, dan kepada wakil VOC Bort 25 bahar. Bort sangat bijaksana dan ramah yang baru diizinkan oleh ratu untuk

mendirikan kantor dagang di Padang. Selain itu, sebagai penghormatan ia pun diangkat pula sebagai Orang Kaya Kumandur Raja. Saat itulah ratu diisukan akan menikah dengannya.¹⁹ Usia ratu sekitar 48 tahun, gosip itu layaknya dongeng. Sebab setelah hidup menjanda sejak usia 29 tahun, seorang wanita biasanya tidak berminat menikah lagi. Isu di atas memang tidak menjadi kenyataan.

Di masa kamalatuddin, muncul fitnah ia mendapat bantuan yang sangat dicurigai dari syahbandar yang ingin menikahkan ratu dengan putranya yang menjadi kepala pengawal pasukan istana. Isu itu membuat pembesar-pembesar istana saling curiga dan cemburu dengan syahbandar itu. Dengan menggunakan kata fitnah, Pamenan tampaknya ingin meyakinkan pembaca bahwa berita di atas tidak benar. Sayangnya, ia tidak mengungkapkan lanjutannya. Berbeda dengan de Roy,²⁰ yang mengungkapkan data sebaliknya. Menurutnyanya, Syahbandar selalu berusaha untuk menikahkan anaknya yang berpangkat kapten dengan sang ratu. Rupanya antara kapten dan ratu tidak bertepuk sebelah tangan dan disadari bahwa hal itu pasti mendapat tanggapan dari para pembesar. Untuk itu, ia minta bantuan de Roy. Akhirnya maksud di

atas tercapai karena Valentijn, menceritakan bahwa perkawinan itu menjadi kenyataan.

Benar atau tidaknya berita di atas, secara langsung maupun tidak, menjadi penyakit kronis yang perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan dan ikatan emosional rakyat kepada ratu. Itu, merupakan salah satu taktik dan siasat kotor untuk melemahkan kedudukan dan menjatuhkan ratu dari tahta kerajaan.

4. Fatwa dari Mekkah

Kelompok oposisi, menawarkan taktik solusi konflik kepada pihak yang pro dengannya agar persoalan mengenai legalitas kedudukan wanita sebagai raja diserahkan kepada raja dan ulama di Mekkah, sebagaimana diungkapkan P. J. Veth sebagai berikut: *akan tetapi, golongan alim ulama tidaklah tinggal diam mereka memperkuat posisinya dengan sepucuk surat dari seorang qāḍī Malikul Adil di Mekkah, yang memuat perintah kepada kepala-kepala dan rakyat Aceh bahwa penempatan seorang wanita pada kekuasaan tertinggi bertentangan dengan syariat Islam. Strategi ini berhasil. Orang-orang kaya tidak berani lebih lama lagi menentang keberanian rakyat. Kamalat Syah diturunkan dari tahta dan pemerintah diserahkan*

*kepada Badrullah Syarif Hasyim Jamaluddin. Sesudahnya, kendali pemerintahan Aceh tidak pernah lagi berada dalam tangan seorang wanita.*²¹

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan diangkatnya wanita menjadi penguasa di Aceh maupun yang menyebabkan jatuhnya dari singgasana kerajaan. Namun, faktor terpenting yang melancarkan jalan mereka menuju puncak kekuasaan adalah adanya situasi dan kondisi yang sangat khusus, yakni tidak adanya putra mahkota.

Selain itu, kepemimpinan wanita dalam politik pemerintahan merupakan masalah *khilafiyah* yang hukumnya tidak tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Boleh atau tidak tergantung arah angin politik. Di samping itu, mitos yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan politik adalah "dunia pria" masih mengakar kuat di masyarakat, sehingga wanita yang berniat terjun ke pentas politik harus berjuang keras melebihi kaum pria.

Catatan Akhir:

1. Rusdi Sufi, *Sultanah Safiatuddin Syah*, dalam *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*,

- Ismail Sofyan, dkk., (Jakarta: Jayakarta Agung, 1994), h. 42.
2. Kematiannya mungkin disebabkan racun yang diberikan kepadanya oleh para wanita Makasar atas perintah orang Portugis. Hal ini dapat diketahui dari laporan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, Antonio Van Diemen, yang ditujukan kepada para penguasa VOC di Belanda pada 9 Desember 1636. Peristiwa tersebut, tampaknya, disebabkan kemarahan orang-orang Portugis terhadap Iskandar Muda yang pada saat-saat terakhir kekuasaannya telah memerintahkan untuk membunuh orang-orang Portugis yang berada di kerajaannya. Hal ini dilakukan Sultan, mungkin, karena rasa dongkolnya kepada Portugis yang telah membuyarkan cita-citanya, ataupun sebagai balas dendam atas kekalahan angkatan perang Aceh di Malaka pada 1629. Akibat dari peperangan itu, angkatan perang Aceh menjadi lemah, terutama armada lautnya. Rusdi Sufi, *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), h. 83. Juga PAA Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam Karya Melayu*, terj. Teuku Hamid, (Banda Aceh: Depdikbud, 1982/1983), h. 51.
 3. Ahli sejarah mengatakan bahwa Iskandar Muda mempunyai putra mahkota bernama Meuroh Popok, dari istri bukan permaisuri. Namun, ia mendapat hukuman mati beberapa hari sebelum ayahnya meninggal karena, (menurut riwayat) telah melakukan perbuatan yang memalukan. Berkaitan dengan hukuman baginya, ada beberapa pendapat. *Pertama*, ia telah berbuat zina dengan istri seorang perwira muda yang menja-

di pelatih dari angkatan perang Aceh. Perbuatan itu tertangkap basah oleh sang suami. Karena terdorong emosi, suami itu langsung membunuh istrinya. Kemudian dia dan mertuanya (ayah si istri) melapor kepada Sultan. Sultan memerintahkan Sri Raja Panglima Wazir Mizan (Menteri Kehakiman) untuk melakukan penyelidikan, akhirnya, ia mengakui perbuatannya dan dijatuhi hukuman mati. *Kedua*, sumber Barat mengatakan bahwa ia berkelakuan jahat dan tidak dapat dikendalikan. Oleh karena berbahaya sekali bagi keselamatan Aceh di kemudian hari, dan prestise Sultan sendiri untuk menghindari ejekan *Tiba di Perut Dikempiskan, Tiba di Mata Dipicingkan*, maka ia dijatuhi hukuman mati. *Ketiga*, sumber Barat lainnya mengatakan bahwa seorang suami melapor kepada Sultan bahwa ia sedang berbuat serong dengan istrinya. Setelah menyampaikan laporan, pria itu bunuh diri. Peristiwa itu membuat Sultan sangat terharu, sehingga ia sendiri yang menyelidiki peristiwa itu. Setelah menemukan kebenarannya, saat itu juga Sultan membunuhnya dengan kerisnya sendiri. Menurut Djajadiningrat, Iskandar Muda menghukum putra tunggalnya karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dan baginda takut kalau-kalau terjadi pertumpahan darah di Aceh bila ia meninggal. Ini mungkin, ada hubungannya dengan penunjukan Iskandar Tsani sebagai pengganti Iskandar Muda. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Pengarang Sendiri, 1961), h. 183. Juga A. Hasymy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Buntang, 1977), h. 44.

4. Muhammad Said, *Aceh*, h. 183

5. Selain Safiatuddin, dan Meuroh Popok yang telah dihukum mati, Iskandar Muda masih mempunyai 2 orang anak lagi. Seorang putri bernama Seri Maharaja Putri Manshuruddin, tetapi tidak ditemukan siapa dan dari mana ibunya, juga sejarah tidak pernah menyebutkan lebih lanjut tentang putri ini; dan seorang putra bernama Panglima Polim atau lebih dikenal dengan Tengku Bahitam karena kulitnya hitam seperti ibunya, yang menurut Hamka, keturunannya Nubia (Sudan). Yang jelas, keduanya dilahirkan dari isteri Iskandar Muda yang bukan permaisuri, dan tidak diketahui saudara seibu atau tidak. Setelah Iskandar Tsani wafat, yang berhak menjadi raja seharusnya Panglima Polim. Tetapi karena dia bukan putra mahkota dan, menurut Hamka, anak gundik, peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Akhirnya, dengan alasan ingin menjaga wasiat ayahnya, Iskandar Muda, yaitu bahwa bagi Kerajaan Aceh ada "Polimnya", sekaligus untuk memenuhi ambisinya dia mencalonkan adiknya, Safiatuddin, menjadi raja, dan dia sebagai Panglima Polimnya. Siasat ini sangat tepat karena dalam adat Aceh, Panglima Polim akan selalu mendampingi raja. Meskipun dia tidak menjadi raja, tetapi dapat menguasai raja. Para ulama pun dikumpulkan untuk membicarakan hal tersebut. Menurut Hamka, meskipun para ulama tidak setuju dengan pengangkatan ratu, tetapi Panglima Polim meyakinkan mereka bahwa meskipun rajanya wanita, dia tidak akan bisa berbuat sekehendak hatinya, seperti kekhawatiran para ulama, sebab Kerajaan Aceh mempunyai *Kanun Makuta Alam* dan ada "Panglima" yang akan menjaga Kanun itu. Hamka, *Dari Perbendaharaan La-*

ma, (Medan: Madju, 1963), h. 192-195.

6. Djajadiningrat, *Kesultanan*, h. 56.
7. M. Yunus Jamil, *Silsilah Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh*, (Banda Aceh: Ajan I Iskandar Muda, 1968), h. 6.
8. H. J. De Graaf, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), h. 126-127.
9. Rusdi Sufi, *Laksamana*, h. 30-31.
10. *Ibid.*
11. *Ibid.*
12. A. Hasymy, *Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 14-15.
13. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 191.
14. *Ibid.*, h. 199.
15. A. Hasymy, *59 Tahun*, h. 176-177.
16. Ilyas Sutan Pamenan, *Rencong Aceh di Tangan Wanita*, (Jakarta: DJ. Waringin 7, 1959), h. 47.
17. Djajadiningrat, *Kesultanan*, h. 60
19. Ilyas Sutan Pamenan, *Rencong*, h. 96.
20. *Ibid.*
21. Djajadiningrat, *Kesultanan*, h. 60.
22. Rusdi Sufi, *Ratu Nurul Alam, Inayat Syah, dan Kamalat Syah*, dalam *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, h. 75.

Daftar Pustaka:

- A. Hasymy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- , *Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- H. J. De Graaf, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Jakarta: Grafiti Pers, 1989.
- Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama*, Medan: Madju, 1963.
- Ilyas Sutan Pamenan, *Rencong Aceh di Tangan Wanita*, Jakarta: Waringin 7, 1959.
- M. Yunus Jamil, *Silsilah Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh*, Banda Aceh: Ajdan Iskandar Muda, 1968.
- Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Pengarang Sendiri, 1961.
- P.A.A.Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam Karya Melayu*, terj. Teuku Hamid, Banda Aceh: Depdikbud 1982.
- Rusdi Sufi, *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda*, Jakarta: Depdikbud, 1995.
- , *Sultanah Safiatuddin Syah*, dalam *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, Ismail Sofyan, dkk, Jakarta : Jayakarta Agung, 1994.

أَحْزَنُ عَلَى فُقْدَانِ الطَّاعَةِ مَعَ عَدَمِ النُّهُوضِ
إِلَيْهَا مِنْ عِلَامَاتِ الْإِغْتِرَابِ

Sedih karena tidak dapat melakukan suatu amal ibadat, yang disertai oleh rasa malas untuk melakukannya, itu suatu tanda bahwa ia terpedaya (tertipu) oleh syaithan.

خَيْرٌ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ مَا هُوَ طَالِبُهُ مِنْكَ.

Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah, ialah apa-apa yang Allah menyuruh kamu.

مَتَى رَزَقَكَ الطَّاعَةَ وَالْغِنَى بِهِ عَنْهَا فَاعْلَمْ أَنَّ
قَدْ سَبَغَ عَلَيْكَ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

Apabila Allah telah memberi rizqi kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat (ibadat) pada lahirmu, dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir batin.